eJournal Pemerintahan Integratif, 2025, 11 (3): 336 – 345
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA (STUDI DI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG)

Bagas Rivaldi[1], Kus Indarto[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pro – Bebaya di Kota Samarinda. Dan untuk menganalisis faktor penghambat implementasi Program Pro – Bebaya di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi melalui pengamatan yang dituliskan peneliti dalam catatan lapangan,dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan implementasi Program Pro-Bebaya di Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Kesesuaian antara Pro-Bebaya dengan pemanfaat untuk mengetahui apakah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program Pro-Bebaya dengan apa yang di butuhkan pemanfaat (Masyarakat), kesesuaian antara Program dan Organisasi pelaksana (POKMAS) mampu menjalankan berbagai macam Program yang dikeluarkan Walikota dalam mensukseskan Pro-Bebaya. Kesesuaian di dukung antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana sudah sesuai dimana tidak memperlukan syarat khusus untuk mendapat bantuan dari Pro-Bebaya. Hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa tidak ada syarat tertentu untuk ikut andil dalam program Pro-Bebaya, karena program ini adalah bukan pengajuan dari RT atau kelurahan maupun dari kecamatan melainkan ini program dari walikota itu langsung.

Kata Kunci : *implementasi program*

Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah upaya peningkatan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sekaligus merupakan proses pembangunan, yaitu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Mewujudkan pembangunan nasional dapat dilihat sebagai contoh pembangunan masa depan internasional yang melaksanakan tugas-tugas nasional masa depan dalam konteks lain.

Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan secara terencana,

---

[1] Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bagasrivaldi390@gmail.com
[2] Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

menyeluruh, berwawasan nasional guna mewujudkan kehidupan yang setara dan setara dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, jelaslah bahwa prakarsa pembangunan nasional diperlukan untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat luas dan pembangunan bangsa yang kuat, demokratis, sesuai Pancasila. Pro-Bebaya adalah inisiatif Walikota Samarinda untuk tahun 2022. Namun, sebagai bagian dari proyek recontouring, dipilih satu Rukun Tetangga untuk setiap kelurahan pada tahun 2021. Karena program yang dimaksud masih baru, sebuah evaluasi keefektifannya sebagai bagian dari kampanye hukum progresif, atau kerjaning hukum di masyarakat, harus dilakukan.

Samarinda merupakan salah satu kota metropolis yang tercantum dalam visi "Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa Yang Maju, Berwawasan Lingkungan, Serta Memiliki Keunggulan Daya Saing Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", dengan demikian harapan Kota Samarinda tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan, namun sebagai pusat pertumbuhan baik ekonomi, hiburan, bisnis, perdagangan, serta pendidikan. Segala sesuatu dalam situasi ini tidak terkait dengan tata kelola masalah secara keseluruhan, sehingga visi belum cukup. Karena semua masalah, baik internal maupun eksternal, membutuhkan solusi yang sistematis, efektif, dan efisien. Satu-satunya isu yang muncul saat ini adalah modifikasi atau revisi peraturan Pro-Bebaya, tetapi proyek terkait belum dimulai.

Peraturan tersebut yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi ketegangan pembangunan yang terjadi, namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak sejalan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan penulis, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang belum berkembang secara maksimal karena masyarakat belum dapat mencapai kesepakatan mengenai strategi bersama dan waktu serta waktu. tempat telah langka. Kurangnya peran ketua RT dalam memberikan informasi dan koordinasi untuk melibatkan masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ilir dalam kegiatan

musyawarah warga, kegiatan gotong-royong, hingga rendahnya partisipasi masyarakat yang tertib.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah instrumen pemerintah, melainkan juga tata kelola yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik, dan bukan hanya dalam arti pemerintahan yang hanya menyangkut aparatur negara. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan adalah hasil dari sinergi, kompromi, atau bahkan persuasi antara berbagai teori, ideologi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang merevitalisasi sistem politik suatu negara (Prewitt, 1973; Agustino, 2006:6).

Ada kutipan dari Friedrich tahun 1969 dalam Agustino (2006:7) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu rencana atau usaha yang dipaksakan oleh seseorang, sekelompok orang, atau penguasa pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, terutama di lingkungan yang terdapat hambatan. dan peluang yang harus diatasi agar kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.

Menurut Davis, Suharto (2007:3) menyatakan pada tahun 2005 bahwa opini publik umumnya memiliki informasi tentang “apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Wacana publik difokuskan pada “apa sebenarnya yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, sebagaimana dinyatakan di atas. Namun menurut Gunn, Suharto menyatakan pada tahun 1990 bahwa opini publik merupakan alat tersendiri yang digunakan oleh.

Menggunakan opini publik sebagai tujuan Pada akhirnya, keluhan masyarakat terdengar keras dan jelas. Akibatnya, dukungan publik menjadi instrumen pemerintah untuk mencapai hasil yang diharapkan publik sebagai konstituennya. Pilihan Tindakan Dalam Kebijakan Bersifat Legal atau Otoritatif Didapatkan Oleh Lembaga yang Memiliki Legitimasi Dalam Sistem Pemerintahan. Hal ini menghimbau pegawai negeri untuk menahan diri dari terlibat dalam kegiatan tertentu atau melakukan proyek tertentu, seperti membiarkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah dilaksanakan oleh sebuah komite atau kelompok lainnya untuk melaksanakan program yang ditargetkan.

Sehubungan dengan definisi yang tercantum di atas, dimungkinkan untuk menyoroti beberapa karakteristik utama dari definisi publik tertentu. Pertama, secara umum, persepsi publik tentang apa pun difokuskan pada situasi yang memiliki tujuan atau tujuan tertentu dibandingkan dengan seseorang yang berperilaku buruk atau tidak pantas. Selain itu, umpan balik publik tampaknya kurang dapat diandalkan dibandingkan komentar bernas ketika menyangkut

inisiatif yang disponsori pemerintah. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengatur inflasi, atau menyediakan kebutuhan rakyat, bukan apa yang mereka pikir akan mereka lakukan. Memang benar opini publik bisa positif atau negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang meyakinkan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor komunikasi. Lebih lama dari yang diharapkan, tampaknya, secara signifikan menghambat setiap keinginan untuk tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi jika orang yang menciptakan keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi diperlukan agar orang yang membuat keputusan dan orang yang menjalankannya menjadi lebih konsisten dalam menjalankan setiap kebijakan yang dicatat di tengah-tengah masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan tertentu akan terhambat jika struktur organisasi badan-badan pelaksana memiliki keterkaitan yang lemah dengan karakteristik tersebut. Menurut Anderson, masyarakat memahami dan menjalankan suatu kebijakan tertentu karena adanya rasa hormat masyarakat terhadap otoritas dan perintah badan-badan pemerintah, serta adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, bukti bahwa kebijakan itu dibuat secara secara rahasia oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang melalui prosedur yang didelegasikan,

Ayat ini dapat diartikan bahwa kebijakan adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang berfungsi sebagai pedoman dan faktor penting dalam pelaksanaan tugas tertentu, serta dalam menentukan bagaimana berperilaku di bawah tekanan. Pernyataan ini dapat dibuat oleh pemerintah, organisasi, kelompok dalam rantai pasokan global, serta individu.

Pengertian Implementasi

Implementasi dapat merujuk pada eksekusi atau penyelesaian secara lebih rinci. Menurut Wildavsky (Usman, 2002:7), “implementasi adalah kegiatan yang diperlukan yang selalu memuaskan”. Menurut Syaukani (2004: 295), implementasi adalah suatu kegiatan tertentu dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat luas sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Yang kedua adalah menggunakan dana hari itu untuk melaksanakan rencana, termasuk dalam bentuk ikrar dan sumbangan, serta untuk mengidentifikasi siapa saja yang bersedia melaksanakan keahlian tersebut.bagaimana mengkomunikasikan keahlian secara efektif kepada masyarakat umum dengan cara yang jelas.

Banyak variabel atau faktor yang akan ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, dan masing-masing variabel tersebut akan

memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk membantu kita memahami berbagai variabel yang berhubungan dengan implementasi, ada beberapa teori implementasi.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai "tindakan-tindakan dari perdebatan-perdebatan sebelumnya" (Budi Winarno, 2008:146–147). Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), sebagaimana dinyatakan dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), implementasi berarti memahami apa yang sebenarnya akan terjadi setelah suatu program dinyatakan telah dimulai atau telah ditetapkan sebagai fokus implementasi, seperti kejadian dan kegiatan-kegiatan yang akan dimulai sesuai jadwal dan diawasi oleh pemerintah negara yang memiliki komitmen kuat untuk melakukannya.

Implementasi Program

Menurut Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu.

1. Pengorganisasian Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. suatu program akan berhasil.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis cermati, seharusnya jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, khususnya studi kasus sebagai fokus utama dan teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan beberapa orang atau kelompok orang. masalah sosial atau kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan penjelasan yang tidak memihak tentang keadaan tertentu.

Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat diadaptasi.Partisipan dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi sumberdata/key informant maupun informant yang akan di mintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian yaitu Lurah Kelurahan Karang Asam Ilir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Sungai Kunjang

Sungai Kunjang adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini adalah hasil pemekaran dari kecamatan Samarinda Ulu yang disahkan dan dibentuk pada Januari 1997. Kecamatan Sungai Kunjang termasuk wilayah yang banyak didapati pabrik-pabrik plywood serta industri lainnya yang berukuran besar, sehingga cukup banyak didiami oleh buruh-buruh yang kebanyakan berasal dari luar Samarinda. Namun, sejak krisis moneter tahun 1998, pabrik-pabrik kayu lapis ini banyak yang tutup dan terjadi pengangguran massal pada tahun 1999. Namun, itu tak berlangsung lama karena pembangunan di sektor lain kembali menggeliat.

Kesesuaian Antara Program Pro – Bebaya Dan Pemanfaat

Dalam mendukung pelaksanaan Program Pro-Bebaya di Kelurahan Karang Asam Ilir, pentingnya dilakukan kesesuaian antara program Pro-Bebaya dan pemanfaat untuk mengetahui apakah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program Pro-Bebaya dengan apa yang di butuhkan pemanfaat (Masyarakat). Menurut Korten (2008:12) kesesuaian antara program dan pemanfaat adalah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

Kesesuaian antara Program Pro-Bebaya dengan masyarakat dapat terlaksana dengan baik karena sudah memberikan dampak bagi masyarakat Kota Samarinda terutama Kelurahan Karang Asam Ilir, Tujuan dari Pro-Bebaya adalah yang pertama, masalah yang dihadapi oleh masyarakat makin cepat ditangani. Kedua, pembangunan di daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke empat sekaligus tujuan dari probebaya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat terutama Kelurahan Karang Asam Ilir tumbuh berkembangnya wirausaha baru yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh RT yang

ada di Kelurahan Karang Asam Ilir. Selain itu melalui Probebaya diberikan bantuan perlengkapan sekolah yang menjadi penyemangat dan memotivasi anak-anak kurang mampu untuk bersekolah.

Kesesuaian Antara Program Pro – Bebaya Dan Organisasi Pelaksana (Pokmas)

Kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Melaksanakan Program merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan Program Pro-Bebaya. Menurut Korten (1988:19) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Jumlah sdm di kelurahan karang asam ilir terdiri dari 3 Pokmas masing masing Pokmas memiliki 10 orang anggota yang di Dominasi Ketua RT, dan dalam ke 3 pokmas itu tiap ketua POKMAS mengkoordinir anggotanya atau Ketua RT.

Karena probebaya termasuk program swakelola, yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki andil dalam melaksanakan program Pro-Bebaya tersebut, Kelurahan Karang Asam Ilir sudah mencukupi untuk melaksanakan program ini, karena dalam 1 kelompok belum tentu semuanya dapat menjalankan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ketua kelompok. SDM pelaksana Program Pro-Bebaya tidak semua merupakan lulusan Sarjana melainkan bervariasi karena POKMAS dan anggota serta ketua RT adalah masyarakat yang tidak mesti Sarjana atau harus lulusan tertentu, masing-masing dari POKMAS dan anggotanya memiliki Skill untuk melaksanakan program Pro-Bebaya ini, karena masing-masing anggota memiliki tugasnya masing-masing dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana

Dalam proses pelaksanaan Pro-Bebaya untuk mengajukan bantuan bukan dari Kelurahan atau Kecamatan, tetapi langsung dari Walikota, untuk masing masing RT agar dapat ikut berperan dalam Pro-Bebaya dapat dilakukan dengan cara menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh pihak Kelurahan.

Contohnya seperti di tiap RT memiliki BUMRT atau koperasi nya di wilayah RT masing- masing untuk dikelola bersama masyarakat, walaupun sebenarnya tidak ada syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan dari Program Pro-Bebaya. Karena Pro-Bebaya bukan Program dari Kelurahan atau RT melainkan Program dari Walikota langsung. Hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa tidak ada syarat tertentu untuk ikut andil dalam program Pro-Bebaya, karena program ini adalah bukan pengajuan dari RT atau kelurahan maupun dari kecamatan melainkan ini program dari walikota itu langsung. Program ini sangat memudahkan dan memberikan kesempatan membangun lingkungan di wilayah masyarakat itu sendiri.

Faktor – Faktor Penghambat Program Pro – Bebaya Di Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Cuaca merupakan sesuatu yang tidak bisa di prediksi datang dan perginya sehingga sangat menghambat pelaksanaan Pro-Bebaya yang sedang dilakukan di lapangan, contohnya seperti lambatnya pengerasan jalan pada saat semenisasi.

Adanya regulasi dan aturan yang terus berubah Membuat aturan dan melakukan pemberitahuan secara mendadak terkait ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan sebelumnya dapat menghambat proses pelaksanaan program Pro-Bebaya.

Rendahnya perhatian dari masyarakat dan sifat egois dari masing masing ketua RT Perhatian masyarakat masih terbilang minim terhadap program Pro-Bebaya. Sehingga keberadaannya dan sistematis pengerjaan dari program Pro-Bebaya tidak diketahui oleh masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat Pro-Bebaya itu sendiri.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian antara program Pro-Bebaya dan pemanfaatan, sudah selesai dengan adanya program Pro-Bebaya ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah Program Pro-bebaya. Dan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 100% baik.

Kesesuaian antara Pro-Bebaya dengan pemanfaat untuk mengetahui apakah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program Pro- Bebaya dengan apa yang di butuhkan pemanfaat (Masyarakat). Kesesuaian antara Program Pro-Bebaya dengan masyarakat dapat terlaksana dengan baik karena sudah memberikan dampak bagi masyarakat Kota Samarinda terutama Kelurahan Karang Asam Ilir, dengan demikian yang pertama, masalah yang dihadapi oleh masyarakat makin cepat ditangani. Kedua, pembangunan di daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke empat sekaligus tujuan dari probebaya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Kesesuaian antara Program dan Organisasi pelaksana (POKMAS) mampu menjalankan berbagai macam Program yang dikeluarkan Walikota dalam mensukseskan Pro-Bebaya. Karena probebaya termasuk program swakelola, yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki andil dalam melaksanakan program Pro- Bebaya tersebut, Kelurahan Karang Asam Ilir sudah mencukupi untuk melaksanakan program ini, karena dalam 1 kelompok belum tentu semuanya dapat menjalankan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ketua kelompok.

Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana sudah sesuai dimana tidak memperlukan syarat khusus untuk mendapat bantuan dari Pro-Bebaya. Hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa tidak ada syarat tertentu

untuk ikut adil dalam program Pro-Bebaya, karena program ini adalah bukan pengajuan dari RT atau kelurahan maupun dari kecamatan melainkan ini program dari walikota itu langsung.

Faktor penghambat dalam Implementasi program pro-bebaya yaitu : cuaca yang tidak menentu saat pelaksanaan program Pro-Bebaya di lapangan, Perubahan regulasi selama proses pelaksanaan program Pro-Bebaya sehingga sering tidak sinkron antara ketua kelompok pelaksana dan anggota pelaksanya, Minimnya perhatian dan inisiatif masyarakat terhadap program Pro-Bebaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan untuk setiap RT agar melakukan pekerjaan di dalam ruangan terlebih dahulu, serta melakukan kegiatan pembangunan dengan tingkat resiko yang rendah terhadap hujan, guna meninghidari faktor cuaca yang tidak menentu. 2. Sebaiknya peraturan yang dibuat oleh penyelenggara perlu pendekatan hukum progesif yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dimasyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan terhindar dari seringnya perubahan/revisi peraturan.

Mengoptimalisasikan kembali dalam memilih anggota pokmas bukan berdasarkan pada ketua RT melainkan masyarakat yang cakap dan ahli dibidang IT, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaporan secara online.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Hal. 24-28.

Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Akdon & Riduwan. 2005. Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistik. Bandung: Alfabeta.

Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.

Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Cooper, Donald R dan C. William Emory, 2004. Metode Penelitian Bisnis. Jilid 1, Edisi kelima. Penerjemah: Dra. Ellen Gunawan, M.A., dan Iamam Nurmawan, S.E. Jakarta. Erlangga.

Koentjaraningrat. (1997). Metode-Metode Penelitian Masyarakat – Metode Wawancara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Mardalis, 2003, Metode Penelitian Suatu Pendkatan Proposal, Cet.VI, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan. Yogyakarta : Yogya Pustaka